

DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN PULAU KALIMANTAN DAN PULAU SUMATERA

Yulia Fransiska Sembiring¹; Candra Mustika²;Helen Parkhurst³

Universitas Jambi

Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Telp. (0741) 583377 Fax. (0741) 583111

E-mail : yuliameliala08@gmail.com (Korespondensi)

Abstract: Economic development does not only focus on increasing economic growth, but also on ensuring the equitable distribution of development outcomes so that they can be felt by all levels of society. Income inequality indicates that economic growth does not always occur alongside equitable distribution. Income inequality in Kalimantan and Sumatra fluctuated during the 2017–2023 period. This study analyzes the effect of GRDP per capita, local government capital expenditure, and the labor force participation rate on income inequality in both regions. This research uses secondary data with a panel data model, combining time series data from 2017 to 2023 and cross-sectional data from Kalimantan and Sumatra. The analysis applies the Fixed Effect Model approach using EViews 12 software. The data were obtained from the Statistics Indonesia (BPS) and local government publications. The results show that, partially, GRDP per capita has a negative and significant effect on income inequality in both Kalimantan and Sumatra. Meanwhile, local government capital expenditure and the labor force participation rate do not have a significant effect on income inequality in either region. The findings also show that income inequality in Kalimantan, at 0,320, is higher than in Sumatra, at 0,318. Therefore, the most influential factor affecting income inequality in Kalimantan and Sumatra is GRDP per capita.

Keywords: *Income Inequality, GRDP per capita, Capital Expenditure, Labor Force Participation Rate, Panel data*

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Todaro dan Smith (2015) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan, berkurangnya kemiskinan, bertambahnya kesempatan kerja, serta menurunnya ketimpangan pendapatan. Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan, sehingga ketimpangan pendapatan masih terjadi. Banyak negara berkembang menghadapi fenomena yang disebut *growth without equity*, yaitu ekonomi tumbuh, tetapi ketimpangan tetap tinggi, (Lestari, 2017).

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi tidak meratanya distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat dalam suatu wilayah. Ketimpangan ini umumnya diukur menggunakan rasio gini (gini ratio), dimana nilai yang semakin mendekati angka nol

menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sedangkan nilai yang mendekati satu menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Menurut

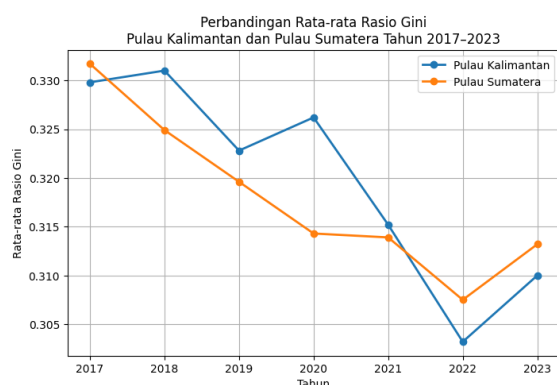
Kuznets dalam (Yusuf et al., 2021) menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan cenderung meningkat, tetapi pada tahap pembangunan yang lebih maju ketimpangan akan menurun seiring pemerataan pembangunan.

Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera merupakan wilayah dengan struktur perekonomian yang berbeda. Pulau Kalimantan memiliki beberapa provinsi dengan PDRB per kapita yang sangat tinggi, terutama karena didukung oleh sektor pertambangan dan sumber daya alam. Namun, tingginya PDRB per kapita tersebut tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang merata. Sebagian besar manfaat pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu

dan kelompok masyarakat tertentu sehingga ketimpangan pendapatan masih terjadi.

Di sisi lain, Pulau Sumatera memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam, seperti pertanian, perkebunan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Meskipun PDRB per kapitanya relatif lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi di Kalimantan, tingkat ketimpangan pendapatannya tidak selalu lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran suatu daerah belum tentu mencerminkan pemerataan distribusi pendapatan.

Gambar 1. Rata-rata Rasio Gini Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera tahun 2017-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Fenomena ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Berdasarkan Gambar 1, rata-rata rasio gini di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera selama periode 2017–2023 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pulau Kalimantan cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan Pulau Sumatera pada beberapa periode. Pada tahun 2018, rata-rata rasio gini Pulau Kalimantan mencapai 0,331, sedangkan Pulau Sumatera sebesar 0,325. Sementara itu, pada tahun 2022 kedua wilayah mengalami penurunan ketimpangan, dimana rata-rata rasio gini Pulau Kalimantan sebesar 0,303 dan Pulau Sumatera sebesar 0,307. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di kedua wilayah masih berfluktuatif dari tahun ke tahun.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB per kapita digunakan sebagai indikator rata-rata pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memiliki PDRB per kapita sebesar 215.761 ribu rupiah pada tahun 2023, jauh lebih tinggi dibandingkan Bengkulu sebesar 24.952 ribu rupiah. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas ekonomi antarwilayah yang berpotensi memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat.

Selain PDRB per kapita, Belanja Modal Pemerintah Daerah (BMPD) juga diduga memengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Menurut Mardiasmo (2018), belanja modal yang tepat sasaran mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dan memperluas akses pelayanan publik. Namun, apabila alokasi pembangunan tidak merata, maka manfaat pembangunan hanya akan dirasakan oleh wilayah tertentu.

Faktor lain yang juga memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Menurut Sukirno pada, (Melsa Fitriani et al., 2025) peningkatan partisipasi angkatan kerja dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Akan tetapi, apabila tenaga kerja lebih banyak terserap pada sektor informal dengan produktivitas rendah, peningkatan TPAK belum tentu mampu mengurangi ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Belanja Modal Pemerintah Daerah (BMPD), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera selama periode 2017–2023.

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi distribusi pendapatan yang tidak merata antar kelompok

masyarakat dalam suatu wilayah. Ketimpangan biasanya diukur menggunakan rasio gini (*gini ratio*), dimana nilai yang mendekati nol menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sedangkan nilai yang mendekati satu menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Menurut Kuznets dalam (Yusuf et al., 2021), ketimpangan pendapatan pada tahap awal pembangunan ekonomi cenderung meningkat, namun pada tahap pembangunan yang lebih matang ketimpangan akan menurun seiring meningkatnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan PDRB per kapita dengan ketimpangan pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Tingginya PDRB per kapita mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro dan Smith (2015), pertumbuhan ekonomi yang disertai peningkatan pendapatan per kapita dapat mendorong pemerataan pendapatan apabila hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian oleh (Janah, 2022) menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Selain itu, teori Kuznets menjelaskan bahwa pada tahap pembangunan ekonomi tertentu, peningkatan pendapatan per kapita akan diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan.

Hubungan Belanja Modal Pemerintah Daerah (BMPD) dengan ketimpangan pendapatan

Belanja Modal Pemerintah Daerah (BMPD) merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan sarana pelayanan publik lainnya. Belanja modal yang

tepat sasaran dapat meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dan memperluas akses terhadap pelayanan public sehingga mampu mendorong pemerataan pembangunan (Mardiasmo, 2018).

Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan ketimpangan pendapatan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menunjukkan besarnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Menurut Sukirno (2016), meningkatnya partisipasi angkatan kerja dapat mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat.

Akan tetapi, peningkatan TPAK belum tentu mampu mengurangi ketimpangan pendapatan apabila sebagian besar tenaga kerja terserap pada sektor informal atau sektor dengan produktivitas rendah. Lewis dalam (Wijayanti et al., 2015) menjelaskan melalui teori dualisme ekonomi bahwa surplus tenaga kerja pada sektor tradisional yang belum terserap secara optimal oleh sektor modern dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan tetap terjadi.

Penelitian (Nasywa Ardella et al., 2025) menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja turut menentukan distribusi pendapatan masyarakat di suatu wilayah.

METODE

Pada penelitian ini, digunakan data sekunder dengan menggunakan model data panel. Model ini menggabungkan antara data *time series* atau data runtun waktu merupakan data yang diperoleh dari amatan satu objek dari beberapa periode waktu (tahun 2017-2023) dan *cross section* yang merupakan data yang didapat dengan mengamati banyak subyek dalam satu waktu yang sama (5 Provinsi di Pulau Kalimantan dan 10 Provinsi di Pulau Sumatera) (Al

Aqilah et al., 2024). Pemilihan penggunaan data panel karena mampu menganalisis perubahan antar waktu sekaligus perbedaan antar provinsi, meningkatkan jumlah observasi sehingga hasil estimasi lebih kuat, serta dapat mengendalikan faktor-faktor yang tidak teramati namun tetap pada masing-masing provinsi. Selain itu, data panel banyak digunakan dalam penelitian ekonomi regional karena lebih informatif dan efisien dibandingkan hanya menggunakan data time series atau cross section (Baltagi, 2005). Penggunaan data sekunder dilakukan berdasarkan ketersediaan data variable-variebel yang meliputi data Ketimpangan pendapatan, PDRB per kapita, Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), serta publikasi pemerintah dan *software* yang digunakan adalah *e-views* 12.

Dalam analisis data panel, terdapat tiga model utama yang dapat digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Penentuan model yang paling sesuai dilakukan melalui beberapa tahap pengujian, yaitu uji Chow untuk membandingkan CEM dengan FEM, uji Hausman untuk memilih antara FEM dan REM, serta uji Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan model terbaik antara CEM dan REM.

Adapun model regresi data panel pada penelitian ini adalah:

$$IKP1_{it} = \alpha + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 BMPD_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + e_{it}$$

$$IKP2_{it} = \alpha + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 BMPD_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + e_{it}$$

Dimana:

Y = Indeks Ketimpangan Pendapatan (IKP)

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel

ε = *Standart Error*

i = Enam Provinsi di Pulau Kalimantan dan sepuluh Provinsi Pulau Sumatera

t = Periode Waktu (2017-2023)

HASIL

Hasil regresi data panel untuk menjawab rumusan dan tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh PDRB per kapita, Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera.

Pulau Kalimantan

Untuk menentukan model regresi data panel yang sesuai pada Pulau Kalimantan, dilakukan Uji Chow sebagai tahap awal pemilihan model. Uji ini digunakan untuk membandingkan Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM), sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Chow Pulau Kalimantan

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.225340	(4,27)	0.0275
Cross-section Chi-square	13.670074	4	0.0084

Sumber: Eviews 12(2026) data diolah

Berdasarkan tabel 1 diperoleh hasil estimasi dengan prob 0,0084<0,05 maka Fixed Effect Model (FEM) dinyatakan lebih layak daripada model CEM. Tahap selanjutnya adalah Uji Hausman untuk menentukan model yang lebih tepat antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Hasil pengujian pada Pulau Kalimantan ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman Pulau Kalimantan

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.761367	3	0.0207

Sumber: Sumber: Eviews 12(2026) data diolah

Berdasarkan table 2 diperoleh hasil estimasi dengan prob 0,027<0,05 maka Fixed Effect Model (FEM) dinyatakan lebih layak daripada model REM.

Hasil estimasi regresi data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM)

digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Kalimantan. Hasil pengujian tersebut ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Regresi data panel model FEM Pulau Kalimantan

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 05/12/26 Time: 23:35				
Sample: 2017 2023				
Periods included: 7				
Cross-sections included: 5				
Total panel (balanced) observations: 35				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.045381	0.327693	0.138486	0.8909
X1	-0.000526	0.000249	-2.112132	0.0441
X2	3.35E-12	6.74E-12	0.497495	0.6229
X3	0.004650	0.004888	0.951386	0.3498
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.411012	Mean dependent var	0.315800	
Adjusted R-squared	0.258311	S.D. dependent var	0.030186	
S.E. of regression	0.025997	Akaike info criterion	-4.264039	
Sum squared resid	0.018248	Schwarz criterion	-3.908531	
Log likelihood	82.62068	Hannan-Quinn criter.	-4.141317	
F-statistic	2.691616	Durbin-Watson stat	2.647383	
Prob(F-statistic)	0.029840			

Sumber: Eviews 12(2026) data diolah

Berdasarkan hasil estimasi pada table 3 maka dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KP1_{it} = 0,045381 - 0,0000526PDRB_{it} + 3,3510^{-12}BMPD_{it} + 0,00465TPAK_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Nilai konstanta sebesar **0,045381**. Artinya apabila selama periode 2017-2023 seluruh variabel independen, PDRB per Kapita, Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Tingkat Partisipasi bersifat konstan atau tetap maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Pulau Kalimantan selama periode penelitian adalah sebesar 0,045381.

Jika PDRB per kapita naik sebesar 1 persen, dengan asumsi variable belanja modal pemerintah dan TPAK tetap, maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,000256.

Jika Belanja Modal Pemerintah Daerah naik sebesar 1 persen, dengan asumsi variable PDRB per kapita dan TPAK tetap, maka akan menaikkan ketimpangan pendapatan sebesar $3,35 \times 10^{-12}$.

Jika TPAK naik sebesar 1 persen, dengan asumsi variable PDRB per kapita dan belanja modal pemerintah tetap, maka akan

menaikkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,00465.

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah PDRB per kapita, Belanja Modal Pemerintah Daerah (BMPD), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Kalimantan. Hasil pengujian simultan tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji F Pulau Kalimantan

F-statistic	2,691616
Prob(F-statistic)	0,02984

Sumber: Eviews 12(2026) data diolah

Berdasarkan hasil table 4, hasil dari regresi Fixed effect dari F-Hitung sebesar 2,691616 dan Fstatistic $0,02984 < 0,05$ yang artinya seluruh variable independen secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di pulau Kalimantan.

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh PDRB per kapita, Belanja Modal Pemerintah Daerah (BMPD), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Kalimantan. Hasil uji t ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji t Pulau Kalimantan

Vari able	Koefisien Regresi	t-		Keterang an
		Statisti c	Prob	
PDR B	-0,000526	0,0002 49	0,04 41	Signifika n
BM PD	3,35x 10^{-12}	6,74x 10^{-12}	0,62 29	Tidak Signifika n
TPA K	0,00465	0,0048 88	0,34 98	Tidak Signifika n

Sumber: Eviews 12(2026) data diolah

Berdasarkan table 5, variable PDRB memperoleh prob. $0,0441 < 0,05$ yang menyatakan bahwa PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Kalimantan sedangkan variable BMPD dan TPAK memperoleh prob. $> 0,05$ yang menyatakan tidak terdapat

pengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Kalimantan.

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi PDRB per kapita, Belanja Modal Pemerintah Daerah (BMPD), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam menjelaskan perubahan ketimpangan pendapatan. Hasil koefisien determinasi ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Koefisien Determinasi Pulau Kalimantan

Variabel	R Squared
PDRB	0,411012
BMPD	
TPAK	

Sumber: Eviews 12(2026) data diolah

Berdasarkan table 6, hasil R^2 menunjukkan nilai sebesar 0,258311 yang menandakan bahwasanya variabel PDRB, BMPD dan TPAK berpengaruh 41,10% terhadap ketimpangan pendapatan di sepuluh provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Sementara itu sisanya 58,9 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pulau Sumatera

Untuk menentukan model regresi data panel yang tepat pada Pulau Sumatera, dilakukan Uji Chow sebagai tahap awal pemilihan model. Uji ini membandingkan Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM), sebagaimana ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Chow Pulau Sumatera

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	31.639402	(9,57)	0.0000
Cross-section Chi-square	125.372920	9	0.0000

Sumber: Eviews 12(2026) data diolah

Berdasarkan table 7, diperoleh hasil estimasi dengan prob 0,0000<0,05 maka Fixed Effect Model (FEM) dinyatakan lebih layak daripada model CEM.

Setelah Uji Chow menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) lebih sesuai dibandingkan Common Effect Model (CEM), tahap selanjutnya adalah melakukan Uji Hausman. Uji ini digunakan untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM)

dan Random Effect Model (REM). Hasil Uji Hausman Pulau Sumatera disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Hausman Pulau Sumatera

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.418669	3	0.0024

Sumber: Eviews 12(2026) data diolah

Berdasarkan table 8, diperoleh hasil estimasi dengan prob 0,0024 < 0,05 maka Fixed Effect Model (FEM) dinyatakan lebih layak daripada model REM.

Setelah Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai model terbaik, analisis dilanjutkan dengan estimasi regresi data panel. Estimasi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita, Belanja Modal Pemerintah Daerah (BMPD), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Hasil estimasi regresi data panel dengan model FEM disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Regresi data panel model FEM Pulau Sumatera

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.382811	0.093241	4.105593	0.0001
X1	-0.001924	0.000610	-3.153863	0.0026
X2	-8.32E-13	2.40E-12	-0.347421	0.7296
X3	2.57E-06	1.50E-05	0.170629	0.8651
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.858403	Mean dependent var	0.317871	
Adjusted R-squared	0.828593	S.D. dependent var	0.026652	
S.E. of regression	0.011034	Akaike info criterion	-6.009653	
Sum squared resid	0.006940	Schwarz criterion	-5.592075	
Log likelihood	223.3378	Hannan-Quinn criter.	-5.843786	
F-statistic	28.79589	Durbin-Watson stat	1.309544	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 12(2026) data diolah

Dari hasil estimasi pada table 9, maka dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KP2_{it} = 0,382811 - 0,001924PDRB_{it} - 8,3210^{-13}BMPD_{it} + 0,000257TPAK_{it} + \mu_{it} \quad (2)$$

Nilai konstanta sebesar **0,382811**. Artinya apabila selama periode 2017-2023 seluruh variabel independen, PDRB per Kapita, Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja konstan atau tetap maka ketimpangan pendapatan yang

terjadi di Pulau Sumatera selama periode penelitian adalah sebesar 0,382811.

Jika PDRB per kapita naik sebesar 1 persen, dengan asumsi variable belanja modal pemerintah dan TPAK tetap, maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,001924.

Jika Belanja Modal Pemerintah Daerah naik sebesar 1 persen, dengan asumsi variable PDRB per kapita dan TPAK tetap, maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar $-8,32 \times 10^{-13}$.

Jika TPAK naik sebesar 1 persen, dengan asumsi variable PDRB per kapita dan belanja modal pemerintah tetap, maka akan menaikkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,000257.

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah PDRB per kapita, Belanja Modal Pemerintah Daerah (BMPD), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Hasil pengujian simultan tersebut disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji F Pulau Sumatera

F-statistic	28,79589
Prob(F-statistic)	0,0000000

Sumber: Eviews 12(2026) data diolah

Berdasarkan hasil table 10, hasil dari regresi Fixed effect dari F-Hitung sebesar 28,79589 dan Fstatistic $0,00000000 < 0,05$ yang artinya seluruh variable independen secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di pulau Kalimantan.

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Variabel yang diuji meliputi PDRB per kapita, Belanja Modal Pemerintah Daerah (BMPD), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Hasil pengujian parsial tersebut disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Uji t Pulau Sumatera

Variable	Koefisien Regresi	t-Statistic	Prob	Keterangan
PDRB		-		
B	-0,001924	3,15386	0,0026	Signifikan
BMPD		-		
D	$-8,32 \times 10^{-13}$	0,34742	0,7296	Tidak Signifikan
TPAK				
K	0,000257	0,170629	0,8651	Tidak Signifikan

Sumber: Eviews 12(2026) data diolah

Berdasarkan hasil pada table 11, variable PDRB memperoleh prob. $0,0026 < 0,05$ yang menyatakan bahwa PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Kalimantan sedangkan variable BMPD dan TPAK memperoleh prob. $> 0,05$ yang menyatakan tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Kalimantan.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan PDRB per kapita, Belanja Modal Pemerintah Daerah (BMPD), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan melalui nilai R-squared, sebagaimana disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Koefisien Determinasi Pulau Sumatera

Variabel	R Squared
PDRB	
BMPD	
TPAK	0,858403

Sumber: Eviews 12(2026) data diolah

Berdasarkan table 12, nilai R^2 menunjukkan nilai sebesar 0,828593 yang menandakan bahwasanya variabel PDRB, BMPD dan TPAK berpengaruh 85,84% terhadap ketimpangan pendapatan di sepuluh provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Sementara itu sisanya 14,16 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh PDRB per kapita terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil regresi data panel, bahwa di Pulau Kalimantan PDRB per kapita memperoleh koefisien sebesar $-0,000526$ dengan nilai prob. $0,0441$ ($0,0441 < 0,05$), dan di Pulau Sumatera memperoleh koefisien sebesar $-0,001924$ dengan nilai prob. $0,0026$ ($0,0026 < 0,05$) dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera cenderung diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien negatif mengindikasikan bahwa ketika pendapatan per kapita masyarakat meningkat, distribusi pendapatan antar penduduk menjadi lebih merata atau jika PDRB per kapita meningkat maka akan diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan pendapatan dan sebaliknya.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kedua pulau tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Janah, 2022) yang menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini sejalan dengan hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa pada tahap pembangunan yang lebih matang, peningkatan pendapatan per kapita akan diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan, sebagaimana digambarkan pada sisi kanan kurva-U terbalik.

Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil regresi data panel, bahwa di Pulau Kalimantan Belanja Modal Pemerintah Daerah memperoleh koefisien sebesar $3,35 \times 10^{-12}$ dengan nilai prob. $0,6629$ ($0,6629 > 0,05$), dan di Pulau Sumatera

memperoleh koefisien $-8,32 \times 10^{-13}$ dengan nilai prob. $0,7296$ ($0,7296 > 0,05$) dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa Belanja Modal Pemerintah Daerah memiliki pengaruh positif di pulau Kalimantan dan pengaruh negatif di pulau Sumatera.

Meskipun hasil regresi tidak signifikan, arah koefisien Belanja Modal Pemerintah Daerah menunjukkan perbedaan antar kedua wilayah. Di Pulau Kalimantan, koefisien Belanja Modal Pemerintah Daerah bernilai positif yang mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, di Pulau Sumatera koefisien Belanja Modal Pemerintah Daerah bernilai negatif yang mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal memiliki kecenderungan mengurangi ketimpangan pendapatan, meskipun pengaruh tersebut tidak terbukti signifikan secara statistik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Theresia, 2020) yang menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan juga dapat dijelaskan oleh Hukum Wagner, Wagner dalam (Magazzino et al., 2015) menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah tidak secara langsung menjamin pemerataan distribusi pendapatan, karena efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas alokasi dan ketepatan sasaran belanja tersebut.

Selain itu, hipotesis Kuznets dalam (Yusuf et al., 2021) menjelaskan bahwa pada fase transisi pembangunan, ketimpangan pendapatan cenderung belum responsif terhadap intervensi fiskal pemerintah. Dengan demikian, temuan ini mengisyaratkan bahwa besaran belanja modal semata belum cukup untuk menciptakan pemerataan pendapatan yang terukur di kedua wilayah tersebut.

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil regresi data panel, bahwa di Pulau Kalimantan TPAK memperoleh koefisien sebesar 0,00465 dengan nilai prob. 0,3498 ($0,3498 > 0,05$) dan di Pulau Sumatera memperoleh koefisien 0,000257 dengan nilai prob. 0,8651 ($0,8651 > 0,05$) dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa TPAK memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera.

Koefisien yang bernilai positif ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja yang berpartisipasi cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan, meskipun pengaruh tersebut tidak terbukti signifikan secara statistik. Kondisi ini dapat terjadi apabila penambahan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang merata di berbagai sektor, sehingga sebagian besar tenaga kerja terserap pada sektor informal atau sektor dengan produktivitas rendah yang justru memperluas kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Nilasari et al., 2025) yang menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dapat juga dijelaskan melalui teori Lewis dalam (Wijayanti et al., 2015) tentang model dua sektor, yang menyatakan bahwa selama surplus tenaga kerja dari sektor tradisional belum terserap sepenuhnya oleh sektor modern, peningkatan partisipasi angkatan kerja belum mampu mendorong pemerataan upah dan pendapatan secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari struktur perekonomian Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera yang masih didominasi oleh sektor primer seperti pertambangan, perkebunan, dan pertanian, sehingga sebagian besar tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja belum sepenuhnya terserap oleh sektor modern yang berproduktivitas tinggi. Kondisi inilah yang menyebabkan peningkatan TPAK di kedua wilayah tersebut belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menekan

ketimpangan pendapatan, bahkan berpotensi memperlebar kesenjangan antar kelompok masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, sedangkan belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui pemerataan investasi dan peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan.

Selain itu, efektivitas belanja modal perlu ditingkatkan dengan mengarahkan pembangunan pada infrastruktur yang produktif dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun TPAK belum menunjukkan pengaruh yang signifikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan tetap penting untuk mendukung pemerataan pendapatan dalam jangka panjang.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode penelitian yang lebih baru serta menambahkan variabel lain yang relevan agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Aqilah, M. R., Muchtar, M., & Robinson Sihombing, P. (2024). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sumatera. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 13–24. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.684>
- Badan Pusat Statistik (2025), Gini Rasio Menurut Provinsi dan Daerah
- Janah, M. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat PDRB PerKapita , Indeks

- Pembangunan Manusia , dan Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia periode tahun 2019-2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 23–44.
- Lestari, D. P. (2017). Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Mamminasata.
- Magazzino, C., Giolli, L., & Mele, M. (2015). Wagner ' s Law and Peacock and Wiseman ' s Displacement Effect in European Union Countries : A Panel Data Study. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(3), 812–819.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Melsa Fitriani Anggun et al. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran tertinggi di Indonesia. *Jurnl Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 883–893.
- Nasywa Ardelia, D., & Sishadiyati. (2025). Pengaruh TPAK, PDRB Industri Pengolahan, PDRB Perdagangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 9(1), 49–63. <https://doi.org/10.31851/neraca.v9i1.18494>
- Nilasari, A., & Febrianti, R. (2025). Analisis Determinasi Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Timur. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 890–896. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.1016>
- Theresia, K. N. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja modal, kesejahteraan masyarakat terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi nusa tenggara timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(2), 137–144.
- Wijayanti, F., & Mahardika, P. (2015). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Industri dan UMKM dalam Perekonomian Dua Sektor di Jawa Timur. *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)*, 1(2), 116–124.
- Yusuf, A. A., Anglingkusumo, R., & Sumner, A. (2021). A direct test of Kuznets in a developing economy: a cross-district analysis of structural transformation and inequality in Indonesia. *Regional Studies, Regional Science*, 8(1), 184–206. <https://doi.org/10.1080/21681376.2021.1924850>